Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum>

Problematis Definisi Harta Pailit untuk Mencapai Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Kepailitan dan PKPU

Problematic of Bankrupt Assets Definition to Achieve Legal Certainty in Bankruptcy and PKPU

Adriel Michael Tirayo* & Yoeffanca Halim**

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Indonesia

Diterima: Oktober 2019; Disetujui: Oktober 2019; Dipublish: Desember 2019

*Email: adrielmtirayo@gmail.com, **Email: yoeffancahalim.9a35@gmail.com

Abstrak

Suatu produk hukum diharapkan dapat mewujudkan 3 tujuan hukum, yaitu Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum. Definisi harta pailit memang tidak disebutkan secara implisit di dalam UU Kepailitan sehingga dapat menimbulkan multitafsir. Pada prakteknya, seperti yang terjadi di dalam putusan Nomor 33/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst atas pailitnya PT. Tripanca Group, dikarenakan tidak adanya ketentuan yang jelas terkait harta pailit. Dalam hal ini, permasalahan yang ingin dijawab adalah bagaimana penerapan pendefinisian "harta pailit" dalam putusan Nomor 33/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst dan upaya yang dapat dilakukan terkait penerapan pendefinisian harta pailit tersebut. Penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan, kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif dan kesimpulan ditarik secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa definisi "harta pailit" dalam praktek menimbulkan multitafsir seperti yang terdapat dalam putusan Nomor 33/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst, dimana hakim turut memasukkan harta yang bukan milik debitur (jaminan pihak ketiga) ke dalam harta pailit sebagai jaminan pelunasan hutangnya. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu melakukan revisi terhadap UU Kepailitan, khususnya terkait definisi Harta Pailit untuk memberikan Kepastian Hukum dan melakukan sosialisasi kepada badan hukum, badan non-hukum, maupun masyarakat sehingga memperoleh pemahaman dan pengetahuan terkait Kepailitan dan PKPU khususnya harta pailit.

Kata Kunci: Harta Pailit, Hukum Kepailitan, Kepastian Hukum.

Abstract

A legal product is expected to realize 3 legal purposes, which is Justice, Expediency and Legal Certainty. The definition of bankrupt assets is not mentioned implicitly in the Bankruptcy Law, that can lead to multiple interpretations. In practice, it happened in the court judgement Number 33/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst for the bankruptcy of PT. Tripanca Group, due to the absence of clear provisions relationg to bankruptcy assets. In this case, the problem to be answered is how is the implementation of bankrupt assets definitions in the court judgement Number 33/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst and the efforts that can be made related to the implementation of bankrupt assets definitions. This research used normative juridical method through literature study, then the data has been analized qualitatively and conclusions are drawn inductively. The results showed that the definition of "bankruptcy assets" in practice led to multiple interpretations as contained in the court judgement Number 33/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst, where the judge also included assets that did not belong to the debtor (third party collateral) into assets bankruptcy as a guarantee of repayment of debt. Therefore, efforts that can be made by the government are to revise the Bankruptcy Law, specifically related to the definition of Bankruptcy Assets to provide Legal Certainty and to disseminate information to legal entities, non-legal entities, and the public so as to gain understanding and knowledge related to Bankruptcy and PKPU in particular about bankruptcy assets.

Keywords: Bankrupt Assets, Bankruptcy Law, Legal Certainty.

How to Cite: Adriel Michael Tirayo & Yoeffanca Halim (2019). Problematis Definisi Harta Pailit untuk Mencapai Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Kepailitan dan PKPU, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6 (2) 2019 : 130 - 137

PENDAHULUAN

Salah satu proses dalam rangka mencapai perubahan adalah Pembangunan yang diupayakan secara terus-menerus dalam meningkatkan masyarakat yang sejahtera (Supartoyo, Tatu, dan Sendouw, 2013). Proses pembangunan tentu berhubungan dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang cepat. Perkembangan ekonomi, dagang dan pengaruh globalisasi dalam dunia usaha telah mengakibatkan timbulnya banyak permasalahan terhadap penyelesaian utang-piutang dalam masyarakat.

Bahwa krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional. Hal tersebut berdampak pada kalangan dunia usaha dalam rangka mengembangkan usahanya menjadi terganggu, bahkan tidak mudah untuk mempertahankan kegiatan usahanya, hal itu sangat berpengaruh juga dalam kemampuan para pengusaha untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya.

Krisis moneter tersebut menyebabkan timbulnya kesulitan bagi banyak debitor dalam membayarkan utangnya, sehingga timbul banyak sengketa utang-piutang yang dapat diselesaikan melalui upaya kepailitan. Kepailitan merupakan upaya dalam rangka menjamin pembayaran utang debitor kepada kreditor. Upaya ini memberikan penawaran terhadap penyelesaian masalah utang-piutang yang efektif, adil, terbuka dan cepat (Nola, 2017). Dalam rangka menanggapi permasalahan tersebut untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maka pada tahun 2004 dibentuklah Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (selanjutnya disebut UU Kepailitan) yang semula diatur dengan UU tentang Kepailitan (Faillissements verordening Staatsblad 1905:217 jo. Staatsblad 1906:348). Perubahan terhadap UU

Kepailitan dilakukan dalam rangka untuk memperbaiki, menambah dan menghilangkan ketentuan yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Namun demikian, perubahan tersebut ternyata juga belum memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Suatu produk hukum diharapkan dapat mewujudkan 3 (tiga) tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum (Muslih, 2013) dalam menunjang pembangunan hukum nasional. Namun dalam implementasinya saat ini terdapat problematik, dimana tidak terdapat norma yang menggambarkan adanya kepastian hukum dalam memahami dan mengimplementasikannya, yaitu terkait dengan definisi harta pailit.

Kepailitan diawali dari terpenuhinya syarat debitor untuk dapat diajukan permohonan pailit yang bertujuan untuk memperoleh pelunasan pembayaran utang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan. Hukum Kepailitan memberikan peluang bagi para kreditor untuk mengajukan kepailitan, bahkan diberikan peluang bagi para kreditor untuk upaya perdamaian yang diajukan dalam rangka mengakhiri perkara yang sedang berjalan. Putusan pailit akan membawa dampak atau akibat terhadap debitor, dimana seluruh harta kekayaan debitor akan dimasukkan ke harta pailit (boedel pailit) yang nantinya dieksekusi oleh kurator dan dibagikan kepada para kreditornya.

Definisi harta pailit memang tidak disebutkan secara implisit di dalam Ketentuan Umum UU Kepailitan. Jika melihat kepada Pasal 21 UU Kepailitan, disebutkan bahwa Kepailitan mencakup seluruh harta kekayaan milik Debitor serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan saat putusan pernyataan pailit dijatuhkan atau diucapkan. Suatu ketentuan yang tidak dijelaskan secara

implisit di dalam peraturan perundang-undangan tentu tidak dapat memberikan kepastian dan akan menimbulkan multitafsir bagi beberapa orang. Pasal tersebut menyebabkan tidak adanya suatu batasan terhadap definisi harta pailit tersebut, yang menyebabkan para pihak yang akan mengeksekusi harta pailit tersebut akan memiliki pendapat-pendapat masing-masing terkait hal-hal apa yang termasuk ke dalam harta pailit itu.

Pada prakteknya, akan timbul kesalahan akan apa yang termasuk ke dalam harta pailit itu, seperti halnya yang terjadi di dalam Putusan Nomor 33/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 3 Agustus 2019 yang menyatakan pailitnya PT. Tripanca Group (debitor pailit). Dikarenakan tidak adanya ketentuan yang jelas terkait harta pailit itu sendiri, maka hakim turut memasukkan harta yang bukan milik debitor (jaminan pihak ketiga) ke dalam harta pailit sebagai jaminan pelunasan hutangnya. Hal tersebut menyebabkan kurator akan melakukan eksekusi jaminan tersebut, yang mana tentu menyebabkan kerugian bagi pihak ketiga, karena tidak adanya kewajiban kepada pihak ketiga untuk turut ditarik ke dalam kepailitan seseorang tanpa syarat-syarat tertentu. Oleh karenanya, dalam rangka mencegah multitafsir terhadap definisi harta pailit tersebut, maka diperlukannya pemahaman dan pengetahuan yang jelas terkait dengan harta pailit dalam pelaksanaan kepailitan dan PKPU.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka adapun permasalahan yang timbul yaitu bagaimana penerapan pendefinisian "harta pailit" dalam Putusan Nomor 33/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst dan upaya yang dapat dilakukan terkait penerapan pendefinisian harta pailit tersebut dalam pelaksanaan Kepailitan dan PKPU. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan

terkait multitafsir penerapan pendefinisian harta pailit dalam Kepailitan dan PKPU sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Nomor 33/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst.

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu metode yang bertitik tolak dari studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan melihat teori-teori yang diatur atau berlaku terkait Harta Pailit dan membandingkan penerapan teori tersebut dalam Putusan Nomor 33/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dimana bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUH Perdata, UU Kepailitan, Putusan Nomor 33/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. Sementara, bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, jurnal maupun artikel mengenai definisi harta pailit dalam Kepailitan dan PKPU.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan UU dan pendekatan Kasus. Pendekatan UU dilakukan dengan melihat pendefinisian harta pailit yang berlaku di dalam UU yang bersangkutan, sedangkan pendekatan Kasus dilakukan dengan melihat penerapan pendefinisian harta pailit tersebut dalam kasus yang terjadi di putusan Nomor 33/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu analisa yang menggambarkan suatu keadaan atau fenomena dengan menggunakan kata-kata atau kalimat yang selanjutnya dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Kesimpulan ditarik secara induktif yaitu dengan menjabarkan hal-hal secara detail dan diakhiri dengan fakta

yang umum atau data sebagai inti permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikmo Mertokusumo (Mertokusumo, 2009), jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik adalah kepastian hukum. Sudah tentu bahwa kepastian hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan, terutama untuk peraturan hukum tertulis. Karena kepastian hukum itu sendiri merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum menjadi keteraturan masyarakat yang berkaitan erat dengan keteraturan seseorang untuk hidup berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam aktivitas kehidupan masyarakat.

Gustav Radbruch (Warassih, 1991) mengatakan bahwa terdapat 2 (dua) macam pengertian kepastian hukum yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam dan/atau dari hukum. Suatu hukum dikatakan berguna adalah apabila hukum tersebut berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat. Kepastian hukum oleh hukum memberikan tugas hukum yang lain, yaitu keadilan pada hukum serta hukum harus berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam dan/atau dari hukum dapat tercapai jika hukum itu sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan yang bertentangan (undang - undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang - undang dibuat berdasarkan *rechstwekelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah yang dapat ditafsirkan secara berlainan.

Menurut Kelsen, hukum merupakan sebuah sistem norma, dimana norma merupakan pernyataan yang menekankan kepada aspek "seharusnya" atau *das-sollen*, dengan menyertakan peraturan terkait apa yang harus dilakukan. Norma-

norma merupakan produk dan aksi manusia yang bersifat deliberatif. Undang - Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu untuk bertingkah-laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu ataupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut yang menimbulkan kepastian hukum (Marzuki, 2008).

Aspek normatif, dan bukan sosiologis, merupakan jawaban terhadap kepastian hukum, oleh karena kepastian hukum dikatakan berlaku secara normatif adalah pada saat suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti, sebab mengatur secara logis dan jelas. Jelas memiliki arti tidak menyebabkan timbulnya keraguan (multi-tafsir) dan logis memiliki arti menjadikan suatu sistem norma dengan norma lain tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Hal tersebut dikarenakan suatu konflik norma yang timbul dari ketidakpastian aturan dapat berupa reduksi norma, konsestasi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum secara tetap, jelas, konsekuen dan konsisten yang pelaksanaannya tidak terpengaruh oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif.

Seluk-Beluk Kepailitan

Secara etimologi, istilah kepailitan berasal dari kata “pailit”. Pailit berasal dari istilah failliet dalam bahasa Belanda yang mempunyai arti, yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Selain Bahasa Belanda, juga dikenal istilah faillite dalam bahasa Perancis yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran dan to fail dalam bahasa Inggris dengan arti gagal atau kegagalan (Situmorang & Soekarso, 1994).

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU Kepailitan, bahwa Kepailitan merupakan sita umum terhadap seluruh harta kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh para Kurator yang berada di bawah Pengawasan Hakim Pengawas.

Syarat seorang debitor dapat diajukan permohonan pailit berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan adalah seorang debitor yang mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang dari kreditor yang telah jatuh tempo atau waktu dan dapat ditagih. Syarat pernyataan kepailitan terhadap debitor merupakan suatu hal yang penting, sebab merupakan suatu rambu atau dasar yang dapat dan harus digunakan hakim untuk menjatuhkan putusan pailit. Hal tersebut agar putusan pailit dijatuhkan sesuai dengan perundang-undangan dan tidak dilakukan secara sembarangan tanpa arah yang jelas, serta tidak menimbulkan pertentangan dalam penegakan hukum itu. Adapun mekanisme daripada kepailitan itu sendiri, terlihat pada gambar berikut,

Gambar 1.1
(Skema Proses dan Jangka Waktu Pemeriksaan Perkara Kepailitan)

Putusan Kepailitan bersifat konstitutif dan serta-merta yaitu meniadakan suatu keadaan dan menciptakan keadaan hukum baru (Hartini, 2007). Akibat kepailitan terhadap debitor pailit hanya terhadap harta kekayaan debitor, dimana debitor tidak berada di bawah pengampunan, tidak kehilangan kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, kecuali apabila perbuatan itu menyangkut proses pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Segala perikatan debitor yang terbit sesudah dijatuhkannya putusan pernyataan pailit tidak dapat lagi membayar harta pailit, kecuali perikatan tersebut ternyata menguntungkan harta pailit.

Pengaturan Harta Debitor Dalam KUH Perdata

Dalam teori ilmu hukum terdapat asas peraturan perundang-undangan yang penting dan dikenal dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Secara sederhana asas tersebut mengandung pengertian bahwa aturan-aturan hukum

yang khusus mengenyampingkan aturan-aturan hukum yang umum (Tobing, 2019). Aturan yang khusus merupakan hukum yang berlaku terhadap peristiwa konkrit yang diatur dalam aturan khusus itu dan memiliki kekuatan hukum mengikat untuk diimplementasikan sehingga dapat mengesampingkan ketentuan dalam aturan hukum yang umum.

KUH Perdata merupakan *lex generalis* daripada UU Kepailitan, karena terdapat ketentuan yang bersifat umum di dalam KUH Perdata untuk diterapkan dalam peristiwa-peristiwa umum yang dalam hal ini terkait dengan Pengaturan Harta Debitor. Berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata, disebutkan bahwa segala barang bergerak dan tidak bergerak milik debitor, baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu.

Pasal tersebut mendefinisikan secara tidak langsung bahwa jika dikemudian hari debitor wanprestasi/cidera janji sehingga menyebabkan ia pailit, maka hanya sebatas harta kekayaannya saja yang masuk ke dalam harta pailit/boedel pailit untuk dilakukan pengurusan serta pemberesan oleh Kurator. Hal itu menjelaskan bahwa harta pihak ketiga bukan merupakan harta debitor dan tidak berhak apabila dimasukkan sebagai harta pailit.

Penerapan Pendefinisian “Harta Pailit” dalam pelaksanaan Kepailitan dan PKPU

Putusan pernyataan pailit membawa akibat hukum bagi si debitor pailit sendiri ataupun harta kekayaannya, dimana sejak dibacakan putusan tersebut oleh hakim pengadilan niaga, maka pada saat itu juga debitor kehilangan hak untuk penguasaan dan melakukan pengurusan terhadap harta kekayaannya. Berdasarkan pasal 21 UU Kepailitan tentang kepailitan dan PKPU, disebutkan bahwa kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan Debitor

pada saat diucapkannya putusan pernyataan pailit beserta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Frasa “kekayaan Debitor” berarti bahwa segala barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan berada di bawah penguasaan dan pengurusan debitor (KBBI). Artinya segala barang yang berada di luar penguasaan ataupun pengurusan debitor bukanlah merupakan harta kekayaan debitor. Pihak ketiga merupakan seorang subjek hukum yang mempunyai kedudukan yang terpisah dari diri debitor, dimana apabila pihak ketiga memiliki suatu barang maka dapat dikatakan bahwa barang tersebut merupakan harta kekayaan pihak ketiga karena berada di bawah penguasaan atau pengurusannya dan bukan masuk ke dalam harta kekayaan debitor. Walaupun memang antara pihak ketiga dan debitor terjalin suatu hubungan hukum, tetapi harta pihak ketiga tidak dapat diikutsertakan dalam harta pailit saat debitor pailit.

Penerapan pendefinisian “harta pailit” dalam pelaksanaan kepailitan dan PKPU saat ini mengalami kerancuan. Dimana jika melihat kepada kasus yang terjadi dalam putusan Nomor 33/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst terjadi kekeliruan bagi hakim dalam penerapan pendefinisian harta pailit di dalamnya. Kasus kepailitan tersebut terjadi kepada PT. Tripanca Group (debitor pailit). Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2009, hakim keliru memberikan pertimbangan hukumnya, dimana hakim menyatakan dalam halaman 11 alinea terakhir yang menjadi dasar putusannya bahwa berdasar prinsip-prinsip hukum jaminan, dimana seluruh harta debitor baik yang ditetapkan dalam boedel pailit, maupun di luar boedel pailit, merupakan jaminan bagi pelunasan utangnya, maka terbukti harta debitor pailit termasuk harta di luar boedel pailit merupakan jaminan bagi pelunasan utangnya kepada para kreditor (in casu para buruh) dan kreditor lainnya.

Berdasarkan Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan menyebutkan bahwa, Kurator berhak untuk menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dilakukan pemberesan. Akan tetapi, tidak berarti seluruh agunan diserahkan kepada kurator. Oleh karena pertimbangan hakim pengadilan niaga dan pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan tersebut, maka PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. sebagai salah satu kreditor debitor pailit menyerahkan kepada kurator 2 (dua) aset atas nama debitor pailit yang dijadikan sebagai agunan kredit, yaitu berupa: 1) mesin-mesin dan peralatan pabrik di Jl Ir. Sutami, Kelurahan Campang Raya, Bandar Lampung yang telah diagunkan dengan jaminan Sertifikat Fiducia No W6.649.HT.04.06.TH.2006/STD tanggal 11 Juli 2006; dan 2) piutang dagang debitor pailit yang telah diagunkan dengan jaminan Sertifikat Fiducia No W6.3975.HT.04.06.TH.2008/STD tanggal 10 November 2008.

Namun, ternyata sertifikat fiducia dalam agunan kredit debitor pailit tersebut bukanlah milik debitor pailit melainkan milik pribadi/perseorangan yaitu berupa Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Sdr. Sugiarto Wiharjo, Ny. Meriana, Sdr. Subu Wijaya, Sdr. Honggo Wijoyo, Sdr. Samiadi, dan Sdr. Budi Priyatno.

Hal tersebut menyebabkan tidak hanya harta kekayaan debitor pailit yang masuk ke dalam boedel pailit, tetapi dapat saja timbul multitafsir bagi beberapa orang sehingga harta di luar kekayaan debitor pailit juga turut dimasukkan ke dalam boedel pailit. Multitafsir demikian timbul karena tidak adanya ketentuan secara implisit terkait definisi "harta pailit" untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat dalam praktek. Sehingga timbul kelemahan hukum karena hukum tersebut tidak dapat memberikan kepastian dalam rangka mewujudkan tujuan pembentukannya. Jika terus dibiarkan, maka tidak hanya terkait dengan harta pailit saja yang mengalami

multitafsir, tetapi akan banyak hal-hal lain yang menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat.

Adapun dalam menyikapi hal tersebut, ada 2 (dua) hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya permasalahan yang serupa, yaitu 1) dengan melakukan revisi terhadap UU Kepailitan, sejak tahun 2004 UU Kepailitan belum dilakukan perubahan terkait substansi-substansi yang terdapat di dalamnya. Sehingga peneliti menganggap bahwa UU Kepailitan itu sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan masyarakat karena terdapat kelemahan di dalamnya yang menyebabkan tidak dapat tercapainya 3 (tiga) tujuan hukum itu dibentuk khususnya Kepastian Hukum. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, dalam melakukan perubahan terhadap substansi UU Kepailitan, perlu diberikan definisi yang jelas terkait Harta Pailit itu sendiri, termasuk apa saja yang dapat dicantumkan ke dalam harta pailit, sehingga lebih memberikan kejelasan kepada para pihak bersangkutan yang menjadikan UU Kepailitan sebagai dasar hukum berperkara; dan 2) Perlu diadakannya sosialisasi oleh pemerintah terkait Kepailitan dan PKPU itu. Sosialisasi diberikan tidak hanya kepada badan hukum atau badan non hukum yang ada, tetapi juga kepada masyarakat, sehingga jika suatu saat masyarakat tersebut mulai menjalankan suatu usaha, mereka dapat memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup terkait dengan Kepailitan itu sendiri khususnya terkait harta pailit.

SIMPULAN

Ketentuan terkait definisi "harta pailit" di dalam UU Kepailitan belum disebutkan secara jelas sehingga timbul multitafsir dalam prakteknya, sebagaimana dalam pertimbangan hakim putusan Nomor 33/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst, walaupun memang disebutkan secara

implisit dalam Pasal 21, namun belum dapat menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yaitu: 1) melakukan revisi terhadap UU Kepailitan, khususnya terkait definisi Harta Pailit untuk memberikan Kepastian Hukum; dan 2) melakukan sosialisasi kepada badan hukum, badan non-hukum, maupun masyarakat sehingga memperoleh pemahaman dan pengetahuan terkait Kepailitan dan PKPU khususnya harta pailit.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, S. (2008). *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Salim, H.S. (2004). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hartini, R. (2001). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartini, R. (2007). *Hukum Kepailitan Edisi Revisi*. Malang: UMM Press.
- Marzuki, P. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Miller, D. (2000). *Principles of Social Justice*. London: Harvard University Press.
- Patrik, P. K. (2007). *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Situmorang, V., dan Soekarso H. (1994). *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Damlah, J. (2017). *Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*. Jurnal Lex Crimen. VI (2).
- Gabrielle, M. (2018). *"Eksekusi Jaminan Dalam Kepailitan Pada Kreditor Separatis Ketika Ditangani Oleh Kurator"*. Jurist-Diction Law Journal. 1 (2).
- Irianto, C. (2015). *"Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)"*. Jurnal Hukum dan Peradilan. 4 (3).
- Kasgari, A.A., Hasan, S.S, dan Fatemeh, E. (2013). *"A Review of Bankruptcy and Its Prediction"*. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences. 3 (4).
- Megarita. (2014). *Legal Protection for the Debtor and Credit or Pledge of Shares on Credit Banking in Indonesia*. International Journal of Humanities and Social Science. 4 (12).
- Muslih, M. 2013. *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*. Jurnal Legalitas. IV (1).
- Nola, L.F. (2017). *Kedudukan Konsumen Dalam Kepailitan*. Jurnal DPR RI, Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan. 8 (2).
- Onakoya, A.B. dan Ayooluwa, E.O. (2017). *Bankruptcy and Insolvency: An Exploration of Relevant Theories*. International Journal of Economics and Financial Issues. 7 (3).
- Prabowo, R. E., Nawis, S, dan Zainuddin. (2018). *Legal Analysis of Debtor Debt Realization of Creditor Through Bankruptcy*. IOSR Journal of Humanities and Social Science. 23 (4).
- Supartoyo, Yesi, H., Jen, T, dan Sendouw, R.H.E.. (2013). *The Economic Growth and The Regional Characteristics: The Case of Indonesia*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan.
- Yuhelson, M. (2016). *The Priority Distribution of Wealth the Debtors Bankrupt (Boedel Bankruptcy) Towards Separatist and Preferential of Creditor Based on Principles of Fairness and Legal*. The Southeast Asia Law Journal. 2 (1).
- Tobing, L. (2012). *Mengenal Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis*. Diunduh di <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt509fb7e13bd25/lex-spesialis-dan-lex-generalis-tanggal-30-agustus>.
- Siregar, N.R. (2012). *Perbedaan Antara Kreditur Separatis dan Kreditur Konkuren*. Diunduh di <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1998/apa-yang-dimaksud-dengan-kreditur-separatis-dan-kreditur-konkuren-dalam-kepailitan-tanggal-10-juli>.